

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT: DAMPAK PANDEMI COVID19

Desri yanto¹⁾, Media Kusumawardani²⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, ²⁾Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya

Corresponding Author : desri.yanto@polsri.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat sebelum pandemi, saat dan setelah covid19 pada periode waktu tahun 2018 sampai 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan laporan keuangan daerah yang dihasilkan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan Pemerintah daerah DKI Jakarta sangat baik pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Untuk pemerintah daerah Jawa Barat rasio keuangannya baik. hal ini terlihat pada Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio, namun untuk rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada pada indikator rasio Tinggi.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Covid19, Kinerja Keuangan

Abstract

The aim of this research is to determine the financial performance of the DKI Jakarta and West Java regional governments before the pandemic, during and after Covid-19 in the time period 2018 to 2022. This research is a quantitative descriptive study by analyzing regional financial performance based on regional financial reports produced by the DKI Jakarta regional government and West Java. The research results show that the financial ratios of the DKI Jakarta regional government are very good in the Regional Financial Independence Ratio, Degree of Decentralization, Regional Tax Effectiveness Ratio and Regional Financial Dependency Ratio. For the West Java regional government, the financial ratios are good. This can be seen in the Ratio of Operational Expenditures to Total Expenditures, Regional Financial Independence Ratio, Degree of Decentralization, Regional Tax Effectiveness Ratio, Ratio, but the Regional Financial Dependency ratio is at a High ratio indicator.

Keywords: Regional Government, Covid19, Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam pembangunan negara dengan fungsi layanan, pengaturan dan pemberdayaan. Untuk mengelola negara yang sangat luas maka adanya penyerahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa peran untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dengan asas otonomi daerah dan pembantuan agar mencapai pembangunan negara yang maju. Otonomi daerah memberikan suatu tanggungjawab besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan dan kewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintah daerah secara mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Otonomi daerah juga berkaitan dengan keuangan

daerah berdasarkan UU No 17 tahun 2003 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk menjalankan aktivitas pemerintahan didaerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah terdapat pada laporan keuangan yang dibuat. Untuk melihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sudah baik, efisien, dan efektif serta target tercapai maka di nilai menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur

tercapainya target dan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Analisis rasio keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah berupa posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Halim, (2012) kinerja keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keberhasilan suatu instansi dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan tata cara tertentu seperti realisasi pendapatan dan belanja yang diperoleh dari basis akrual. Menurut Mahmudi, (2016) kinerja keuangan merupakan alat ukur yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial yang didasari pada penafsiran angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kinerja dan hasil keuangan.

Kinerja keuangan yang dinilai dalam penelitian ini terkait dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah, menggunakan 5 rasio kinerja keuangan yaitu Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah serta laporan yang digunakan yaitu laporan keuangan tahun 2018 sampai 2022. Dasar penelitian ini dilakukan dikarenakan adanya pandemi covid19 yang melanda indonesia dan dunia. Pandemi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masyarakat dalam mobilitasi kegiatan, adanya pembatasan terkait pertemuan, kegiatan diluar rumah, perjalanan antar kota sehingga membuat aktivitas ekonomi terganggu. Hal ini juga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. (Maryanti & Munandar, 2021) menemukan bahwa pandemi covid19 berdampak pada kinerja kota Surabaya. selain itu menurut Hafizi & Amalia, (2022) menyatakan bahwa pandemi covid19 mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten jember. Adanya pembatasan mobilitas masyarakat juga berdampak turunnya pengawasan keuangan daerah Zamri, (2020) menemukan kinerja keuangan dipengaruhi oleh pengawasan, semakin kecil pengawasan maka kinerja keuangan akan turun dan pengawasan dilakukan dengan baik maka kinerja akan membaik.

Berbagai penelitian terkait kinerja keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan Rheswari & Akbar, (2022) menunjukkan bahwa kabupaten gresik memiliki nilai rasio efektifitas 104% sangat efektif, rasio kemandirian 251% posisi delegative, rasio desentralisasi 32% pada posisi cukup, rasio komabilitas belanja operasi 75% dan modal 11% serta rasio efisiensi 84%. Ariadi et al., (2021) menemukan bahwa provinsi papua tingkat kemandirian 20%, tahun 2020 provinsi papua memiliki belanja rutin cukup signifikan serta total belanja memiliki dampak pandemi sehingga meningkat terhadap peningkatan PAD provinsi papua. Penelitian Tumijal, Ghina Sinta menemukan bahwa kabupaten Cilacap memiliki rasio kemandirian masih rendah, masih bergantung kepada pemerintah pusat. (Harahap, 2020) menunjukkan bahwa kabupaten Tapanuli tengah memiliki rasio ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi, derajat keuangan rendah, dan pendapatan asli daerah tidak tercapai. Digidowiseiso & Alfian, (2023) menemukan bahwa kabupaten bima memperoleh kinerja efektifitas PAD rendah, kinerja kemandirian berada pada instruktif, rasio desentralisasi pada posisi kurang baik serta rasio aktivitas menunjukkan bahwa belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Sartika, (2019) menunjukkan bahwa kepulauan meranti memiliki kinerja efisiensi berada pada nilai 72,84%, rasio regional masih sangat rendah, rasio efektifitas sangat efektif, rasio desentralisasi 3,31% sangat kurang dan rasio pengeluaran operasional pada nilai 74,14%.

Putri Mulyaningsih et al., (2022) menemukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten magelang menunjukkan hasil nilai rasio pertumbuhan belanja modal -22,57%, rasio pertumbuhan belanja operasi -2,05%, rasio kemandirian 19,02% posisi instruktif, rasio pertumbuhan PAD -4,02%, rasio pertumbuhan pendapatan 1,89%, rasio efektifitas 102,33% pada posisi efektif, rasio belanja operasi 77,71%, belanja modal 21,23% dan rasio efisiensi 78,29% posisi efisien. Awani & Hariani, (2021) menemukan kabupaten di pulau sumatera dimana tingkat kemandirian periode 2015-2018 berada pada nilai 25%, efektifitas pengelolaan PAD rata-rata 90% dan laju pertumbuhan PAD pada posisi fluktuatif. Putri & Munandar, (2021) menemukan kota malang dengan nilai rasio kemandirian

dibawah 50%, rasio ketergantungan menunjukkan kota malang cukup tinggi bergantung kepada pemerintah pusat, PAD relatif kecil dan rasio realisasi PAD sangat efektif. Penelitian ini melihat dampak pandemi covid19 pada kondisi sebelum pandemi covid19, saat pandemi covid19 dan setelah pandemi covid19 pada pemerintah daerah dua teratas yang sangat terdampak pandemi covid19 dilihat dari jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi di seluruh Indonesia, DKI Jakarta 1.568.320 terkonfirmasi dan Jawa Barat 1.251.851 terkonfirmasi. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jabar, informasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja keuangan, serta untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan dengan baik dan tepat sasaran untuk kemakmuran masyarakat banyak.

Penelitian ini menggunakan data terbaru dari laporan keuangan yang dapat diakses publik yaitu periode tahun 2018 sampai 2022, penelitian ini menggunakan sampel Provinsi yang paling banyak terkena dampak oleh pandemi covid19 serta keuangan paling besar se indonesia. Variabel rasio yang digunakan lima rasio dari rasio belanja operasi terhadap belanja, rasio kemandirian, desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan ketergantungan keuangan daerah. Rasio yang digunakan mewakili semua unsur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Periode pengamatan yang penting untuk melihat dampak pandemi yaitu digunakan periode masa sebelum, saat dan setelah pandemi covid19 melanda indonesia.

2. TELAHAH LITERATUR

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio belanja operasi terhadap total belanja merupakan bagian dari analisis keserasian, analisis ini untuk melihat kesesuaian antara belanja operasi terhadap total belanja dalam hal ini yang berkaitan dengan fungsi penganggaran, alokasi belanja, dan stabilitas keuangan. Analisis keserasian digunakan agar adanya harmonisasi keuangan pemerintah daerah pada belanja daerah agar fungsi penganggaran

berjalan dengan baik (Mahmudi, 2016). Analisis rasio keserasian digunakan untuk melihat gambaran kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait alokasi yang dibuat mengenai belanja modal dan operasi. Suatu daerah memiliki kebijakan belanja operasi lebih besar dari belanja modal maka keuangan pemerintah yang dialokasikan untuk belanja modal kecil. Semakin besar nilai belanja operasi maka semakin kecil nilai belanja modal, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja investasi seperti untuk sarana dan prasarana yang berkaitan terkait ekonomi masyarakat juga kecil. Sebaliknya jika nilai belanja operasi lebih kecil dari belanja modal atau belanja modal lebih besar dari belanja operasi maka pemerintah memilih kebijakan bahwa belanja investasi bernilai besar untuk mendanai sarana dan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat serta biaya operasi seperti gaji pegawai cenderung kecil (Halim, 2012).

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Kasmir, (2019) rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rumus perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti dana transfer, pinjaman dan lainnya. Hasil perhitungan rasio kemandirian jika semakin tinggi nilainya maka menggambarkan suatu daerah semakin mandiri kemampuan daerah untuk membiayai semua aktivitas pemerintah daerah, jika sebaliknya nilai rasio kemandirian semakin kecil maka pemerintah daerah semakin tidak mandiri kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatannya atau dana bantuan pemerintah pusat besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

c. Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi, (2016) rasio derajat desentralisasi merupakan alat ukur untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bernegara yang berkaitan pelayanan umum yang baik dan membuat tahapan pengambilan keputusan dilakukan secara

demokratis dan dapat terwujud atas pemberian wewenang. Rasio desentralisasi diukur menggunakan rumus yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Nilai rasio desentralisasi yang dihasilkan kecil maka menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan jumlahnya kecil, artinya pemerintah daerah tidak mampu memaksimalkan potensi keuangan pemerintah daerah serta pemerintah daerah cenderung pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan lainnya seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Nilai rasio desentralisasi besar maka pemerintah daerah mampu menghasilkan PAD yang besar untuk menyumbang total pendapatan.

d. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mahmudi, (2016) rasio efektifitas pajak daerah merupakan rasio yang diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pajak daerah. Rasio efektifitas diukur dengan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah. Nilai rasio efektifitas tinggi maka pemerintah daerah sangat efektif dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah, sebaliknya jika rasio efektifitas kecil maka pemerintah tidak efektif dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah. Rasio efektifitas yang tinggi menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah sangat tinggi bahkan melebihi dari target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan.

e. Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi, (2016) rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang diukur untuk menilai seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan. Nilai rasio ketergantungan kecil maka menggambarkan bahwa kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, jika nilai rasio ketergantungan besar maka menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung

kepada pemerintah pusat. Rasio kemandirian kecil maka nilai pendapatan transfer kecil dalam menyokong total pendapatan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian dilakukan untuk menggambarkan karakteristik suatu kejadian atau populasi yang menjadi sampel dari penelitian ini. Metode Deskriptif Kuantitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini, Metode Deskriptif Kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menguji terkait teori, fakta, hubungan antar variabel, mendeskripsikan hasil statistik, serta memperkirakan hasilnya nanti (Tanzeh, 2011). Sampel merupakan bagian dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2017). Sampel pada penelitian ini yaitu Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan tahun pengamatan yaitu tahun 2018 sampai 2022. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi dari data yang telah ada (Ghozali & Latan, 2015). Data pada penelitian ini diperoleh dari data laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan 5 rasio yang diukur dan diklasifikasikan yaitu Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Daerah dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Adapun tahapan analisis pada penelitian ini yaitu:

1. Membuat perhitungan kinerja keuangan daerah dengan perhitungan rasio keuangan sebagai berikut ini:

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rumus Perhitungannya:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Kriteria Penilaian Menurut Sumber:

(Mahmudi, 2016) menyatakan bahwa rasio belanja operasi berada diantara 60-90%

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus Perhitungannya:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

No	Persentase PAD terhadap Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Kemandirian	Ket
1	0 – 25%	Rendah Sekali	Instruktif
2	25 – 50%	Rendah	Konsultatif
3	50 – 75%	Sedang	Partisipatif
4	75 – 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2016)

c. Derajat Desentralisasi

Rumus Perhitungannya:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi

No	Derajat Desentralisasi	Kemampuan keuangan Daerah
1	00,00 – 10,00	Sangat Kurang
2	10,01 – 20,00	Kurang
3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Baik
6	>50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2016)

d. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rumus Perhitungannya:

$$\text{Rasio Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian rasio efektivitas pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas Pajak Daerah

No	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah	Efektivitas Pajak Daerah
1	>100	Sangat Efektif
2	100	Efektif
3	90 - 99	Cukup Efektif
4	75 – 89	Kurang Efektif
5	< 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

e. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rumus Perhitungannya:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Derajat Desentralisasi	Kemampuan keuangan Daerah
1	00,00 – 10,00	Sangat Rendah
2	10,01 – 20,00	Rendah

3	20,01 – 30,00	Sedang
4	30,01 – 40,00	Cukup
5	40,01 – 50,00	Tinggi
6	>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi (2016)

- Setelah diperhitungkan nilai kinerja keuangan berdasarkan penilaian rasio, berikutnya mengklasifikasikan nilai rasio pada kriteria yang diperoleh masing-masing rasio
- Melakukan interpretasi dan analisis kinerja keuangan berdasarkan perhitungan kinerja keuangan dan kriteria yang diperoleh

perhitungan atau pengukuran maka akan dilakukan klasifikasi berdasarkan indikator ketercapaian masing-masing rasio. Berikut pengukuran dan klasifikasi setiap rasio dengan indikator masing-masing:

- Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Hasil perhitungan dan klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat terlihat pada tabel berikut ini:

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui nilai setiap rasio yang diukur, setelah dilakukan

Tabel 5 Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Indikator
1	2018	46.943.316.200.855	61.063.848.818.057	76,876	60-90%
2	2019	52.545.745.724.373	64.099.287.469.013	81,976	
3	2020	43.835.699.863.256	51.716.860.929.662	84,761	
4	2021	53.925.743.776.335	61.231.460.250.253	88,069	
5	2022	55.542.186.969.752	64.380.358.560.086	86,272	
Rata-rata				83,59	

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 6 Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Indikator
1	2018	18.981.038.246.976	33.333.824.961.824	56,942	60-90%
2	2019	19.907.453.301.108	35.833.086.126.516	55,556	
3	2020	21.066.529.850.169	38.127.531.749.249	55,253	
4	2021	23.385.024.872.111	37.470.910.437.064	62,408	
5	2022	17.173.841.212.703	32.774.222.386.723	52,400	
Rata-rata				56,512	

Sumber: Data diolah, 2024

Rasio belanja operasi terhadap total belanja untuk mengetahui seberapa besar keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat digunakan untuk kegiatan operasi. Provinsi KI Jakarta memiliki nilai rata-rata total belanja yang digunakan untuk belanja operasi sebesar 83,59% sangat tinggi. rata-rata rasio ini sebesar 83,59% dana belanja digunakan untuk kegiatan operasi sedangkan sisanya 16,41% digunakan untuk belanja modal. Pemerintah DKI

Jakarta dari tahun 2018 sampai 2022 sangat kecil sekali mengalokasikan belanja untuk belanja modal rata-rata nilainya sebesar 16,41%, dana belanja untuk modal kecil sehingga pembelian sarana dan prasarana sangat terbatas, dibandingkan dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat besaran rata-rata tahun 2018 sampai 2022 nilai belanja yang digunakan untuk belanja operasi sebesar 56,512% dan sisanya sebesar 43,488 digunakan untuk belanja modal. Nilai

belanja modal di Jawa Barat lebih besar dibandingkan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai rasio belanja operasi terhadap total belanja DKI Jakarta sebelum pandemi covid memiliki nilai rata-rata 79,426 dimana belanja operasi memiliki nilai 79,426% dari total nilai belanja pemerintah DKI Jakarta. Nilai belanja modal sebesar 20,58% digunakan pemerintah daerah sebelum pandemi. Saat pandemi nilai rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 86,415% dan setelah pandemi turun menjadi 86,272%. Nilai rasio belanja operasi terhadap total belanja Jawa Barat sebelum pandemi covid memiliki nilai rata-rata 56,249 dimana belanja operasi memiliki nilai 56,249 % dari total nilai belanja pemerintah DKI Jakarta. Nilai belanja modal sebesar 43,76% digunakan pemerintah daerah sebelum pandemi. Saat pandemi nilai rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja sebesar 58,83% dan setelah pandemi turun menjadi 52,4%.

Pandemi covid19 mampu mempengaruhi rasio belanja operasi terhadap total belanja (Tumija & Sinta, 2022), hal ini terlihat dari naiknya nilai rasio belanja operasi terhadap total

belanja pada saat pandemi dan turun kembali saat setelah pandemi. Kondisi pandemi yang melanda indonesia mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk menjaga atau mengendalikan pademi covid19 agar tidak menyebar luas serta tidak menginfeksi kepada masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan alata-alat kesehatan yang banyak untuk membantu para tenaga kesehatan yang melayani semua pasien covid19 sehingga membutuhkan dana untuk belanja operasi yang besar serta selain untuk membeli alat kesehatan dana belanja operasi digunakan untuk membiayai aktivitas pengendalian pandemi covi19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak atas terjadinya pandemi covid19 seperti hilangnya pekerjaan, usaha ditutup dan pembatasan masyarakat.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan dan klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Kemandirian Daerah Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	PAD	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Indikator
1	2018	43.327.136.602.811	17.855.177.072.924	242,659	Delegatif
2	2019	45.707.400.003.802	14.551.571.351.179	314,106	Delegatif
3	2020	37.414.754.711.193	16.962.899.288.632	220,568	Delegatif
4	2021	41.606.307.405.630	22.673.794.344.052	183,500	Delegatif
5	2022	45.608.404.729.501	18.860.858.779.549	241,815	Delegatif
Rata-rata				240,53	Delegatif

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 8 Kemandirian Daerah Pemerintah Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	PAD	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Indikator
1	2018	19.642.915.448.763	14.241.750.403.584	137,925	Delegatif
2	2019	21.244.266.598.017	14.757.951.840.649	143,951	Delegatif
3	2020	18.521.882.178.042	15.910.828.461.271	116,411	Delegatif
4	2021	20.333.679.966.126	16.606.086.315.554	122,447	Delegatif
5	2022	23.249.622.253.957	9.889.116.424.368	235,103	Delegatif
Rata-rata				151,167	Delegatif

Sumber: Data diolah, 2024

Pengukuran untuk rasio kemandirian daerah diukur untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan yang dimiliki daerah terhadap bantuan dana seperti Transfer Pusat, Provinsi dan

Pinjaman terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah DKI Jakarta memiliki nilai rasio kemandirian yang fluktuatif setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk rasio

kemandirian pemerintah daerah Jawa Barat memiliki nilai delegative yang artinya pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian yang baik dimana terlihat pada nilai PAD yang dimiliki lebih besar dibandingkan nilai dana transfer pemerintah pusat.

Rasio kemandirian pemerintah daerah DKI Jakarta rata-rata sebelum pandemi sebesar 278,38% yang artinya pemerintah daerah sangat mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfer pusat, saat pandemi nilainya turun menjadi 202,03% dan kembali naik setelah pandemi menjadi 241,815%. Untuk pemerintah Jawa Barat nilai rata-rata kemandirian pemerintah daerah sebelum pandemi sebesar 140,938%, kemudian turun saat pandemi menjadi 119,429% dan kembali naik setelah pandemi menjadi 235,103%.

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitas pemerintahan tanpa bergantung pada pemerintah pusat untuk menjalankan kegiatan pemerintahan (Putri & Munandar, 2021). Pada masa pandemi covid19 provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami penurunan kemandirian dikarenakan pendapatan asli daerah turun akibat pemerintah tidak dapat menarik pajak dari masyarakat dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Pada masa pandemi

masyarakat dilarang untuk melakukan usaha dan berkumpul sehingga aktivitas ekonomi menurun berakibat pada turunnya pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak.

Pandemi covid19 mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terutama pada pendapatan asli daerah dikarenakan adanya penurunan aktivitas ekonomi. Namun setelah pandemi melanda rasio kemandirian pemerintah daerah kembali naik, hal ini menjadi bukti bahwa pandemi mampu mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan daerah dan kinerja keuangan daerah menjadi terganggu. Selama pandemi covid19 pemerintah bergantung kepada bantuan pemerintah pusat untuk membantu membiayai aktivitas operasi pemerintah daerah yang berjuang untuk mengendalikan pandemi covid19 agar tetap aman dan tidak menyebar luas serta membantu menyediakan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan bagi masyarakat di daerah masing-masing.

c. Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan dan klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Derajat Desentralisasi Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi	Indikator
1	2018	43.327.136.602.811	61.235.824.747.633	70,755	Sangat Baik
2	2019	45.707.400.003.802	62.300.679.833.068	73,366	Sangat Baik
3	2020	37.414.754.711.193	55.887.004.237.727	66,947	Sangat Baik
4	2021	41.606.307.405.630	65.567.009.199.000	63,456	Sangat Baik
5	2022	45.608.404.729.501	67.290.479.172.308	67,778	Sangat Baik
Rata-rata				68,46	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 10 Derajat Desentralisasi Pemerintah Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi	Indikator
1	2018	19.642.915.448.763	33.919.022.032.347	57,911	Sangat Baik
2	2019	21.244.266.598.017	36.037.894.762.460	58,950	Sangat Baik
3	2020	18.521.882.178.042	34.504.275.705.318	53,680	Sangat Baik
4	2021	20.333.679.966.126	36.991.873.324.931	54,968	Sangat Baik
5	2022	23.249.622.253.957	33.236.110.512.395	69,953	Sangat Baik
Rata-rata				59,092	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2024

Rasio derajat desentralisasi untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dari kekuatan pendapatan asli daerah.

Rasio ini membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah, hal ini untuk menunjukkan seberapa kuat PAD daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah DKI Jakarta sebelum pandemi covid19 memiliki nilai rata-rata 72,0605%, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah dari pajak sebesar 72,0605% dengan kondisi yang sangat baik. kondisi kemampuan daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat menurun ada saat pandemi menjadi 65,2015% dan setelah pandemi naik kembali menjadi 67,778%. Untuk pemerintah daerah Jawa Barat memiliki kondisi sangat baik. rasio desentralisasi pada masa pandemi turun dari 58,4305 menjadi 54,324 kemudian naik setelah pandemi menjadi 69,953.

Pandemi covid19 memberikan dampak pada nilai desentralisasi yang dimiliki pemerintah daerah, hal ini terlihat dari turunnya nilai desentralisasi saat pandemi dan kembali pulih saat setelah pandemi. Selama pandemi covid 19 melanda indonesia memiliki dampak besar pada

kinerja keuangan pemerintah daerah (Rahmani, 2020). Pemerintah daerah kesulitan untuk memperoleh pendapatan asli daerah secara maksimal dikarenakan pandemi, hal ini diakibatkan oleh adanya pembatasan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat seperti dilarang berkumpul, usaha dilarang dibuka, penutupan usaha, dilarang keluar rumah sehingga berakibat pada turunnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah sehingga daerah mengalami kekurangan dana untuk membiaya aktivitas operasional untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Faktor utama penurunan ini diakibatkan adanya pandemi covid19.

d. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Hasil perhitungan dan klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Indikator
1	2018	37.538.912.327.312	38.125.000.000.000	98,463	Cukup Efektif
2	2019	40.298.122.505.326	44.540.000.000.000	90,476	Cukup Efektif
3	2020	31.895.263.277.623	32.480.000.000.000	98,200	Cukup Efektif
4	2021	34.575.563.219.175	37.215.000.000.000	92,908	Cukup Efektif
5	2022	40.275.148.196.210	45.700.000.000.000	88,129	Kurang Efektif
Rata-rata				93,64	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 12 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Indikator
1	2018	19.642.915.448.763	18.817.250.109.020	104,388	Sangat Efektif
2	2019	21.244.266.598.017	19.223.000.942.000	110,515	Sangat Efektif
3	2020	18.521.882.178.042	21.831.985.140.899	84,838	Kurang Efektif
4	2021	20.333.679.966.126	19.553.536.343.937	103,990	Sangat Efektif
5	2022	23.249.622.253.957	22.148.286.583.164	104,973	Sangat Efektif
Rata-rata				101,741	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2024

Rasio efektifitas diukur untuk mengetahui seberapa efektif suatu daerah merealisasikan target penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektifitas maka semakin besar realisasi pajak daerah dibandingkan dengan target pajak daerah, jika nilainya melebihi 100% maka realisasi pajak

daerah melewati dari target pajak daerah yang telah ditetapkan. Nilai rasio efektifitas pada pemerintah daerah DKI Jakarta mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2018 sampai 2022. Nilai rasio efektifitas pemerintah daerah DKI Jakarta sebelum pandemi 94,4695% artinya pemerintah daerah mampu merealisasikan target

penerimaan pajak daerah sebesar 94,4695% dari target yang ditetapkan. Saat pandemi covid19 rasio efektifitas mengalami kenaikan menjadi 95,554% dan kembali turun setelah pandemi menjadi 88,129. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah selama pandemi sangat berusaha keras untuk mencapai target pajak yang diharapkan.

Pemerintah daerah Jawa Barat memiliki nilai rasio efektifitas sebelum pandemi senilai 107,4515% artinya pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar 107,4515% dari target yang ditetapkan. Pada saat pandemi nilai rasio efektifitas turun menjadi 94,414 dan kembali naik pada saat setelah pandemi covid dengan nilai 104,973. Pemerintah daerah Jawa Barat terdampak pandemi covid19 pada kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target penerimaan pemerintah dari pajak daerah.

Kondisi yang berbeda antara daerah DKI Jakarta dengan Jawa barat, hal ini terlihat bahwa DKI Jakarta pada saat pandemi tidak terlalu berdampak pada realisasi target pendapatan karena nilainya naik. Salah satu faktornya yaitu kebutuhan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta saat pandemi untuk membiaya aktivitas

pandemi yang besar sehingga mendorong untuk secara maksimal merealisasikan penerimaan daerah dari pajak.

Hasil untuk daerah Jawa barat berbeda dengan DKI Jakarta. Untuk daerah Jawa Barat saat pandemi melanda kinerja keuangan rasio efektifitas turun kemudian naik kembali setelah pandemi melanda, hal ini menjadi bukti bahwa pandemi berdampak pada tidak mampunya pemerintah daerah untuk merealisasikan target pajak pada saat kondisi pembatasan masyarakat secara besar-besaran. Melandanya pandemi covid19 berakibat pada aktivitas ekonomi masyarakat yang turun, masyarakat dibatasi mobilitasnya, usaha ditutup, masyarakat dilarang keluar rumah sehingga ekonomi masyarakat tidak berjalan baik. Ekonomi masyarakat yang menurun berpengaruh pada kemampuan masyarakat atau usaha untuk memperoleh keuntungan sehingga menurunkan nilai pajak yang dibayar masyarakat (Sartika, 2019).

e. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan dan klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Ketergantungan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan	Indikator
1	2018	17.855.177.072.924	61.235.824.747.633	29,158	Sedang
2	2019	14.494.393.043.179	62.300.679.833.068	23,265	Sedang
3	2020	16.897.722.313.632	55.887.004.237.727	30,236	Cukup
4	2021	22.630.423.484.052	65.567.009.199.000	34,515	Cukup
5	2022	18.831.174.546.549	67.290.479.172.308	27,985	Sedang
Rata-rata				29,03	Sedang

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 14 Ketergantungan Keuangan Pemerintah Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan	Indikator
1	2018	14.208.000.403.584	33.919.022.032.347	41,888	Tinggi
2	2019	14.715.372.046.649	36.037.894.762.460	40,833	Tinggi
3	2020	15.881.415.189.271	34.504.275.705.318	46,027	Tinggi
4	2021	16.489.128.153.554	36.991.873.324.931	44,575	Tinggi
5	2022	9.821.049.167.368	33.236.110.512.395	29,549	Sedang
Rata-rata				40,575	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2024

Pengukuran seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana transfer yang diberikan diukur menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah, semakin besar

nilai rasio ketergantungan maka semakin besar nilai dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah

DKI Jakarta terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami fluktuatif dari tahun 2018 sampai 2022. Nilai rasio ketergantungan pada pemerintah daerah DKI Jakarta pada saat sebelum pandemi covid19 dengan nilai rata-rata sebesar 26,2115, hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta berada pada posisi sedang bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah DKI Jakarta mampu membiayai aktivitas operasi daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan keuangan sendiri yang diperoleh dari pendapatan daerah tanpa bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pada saat pandemi covid nilai rasio efektivitas meningkat menjadi 32,3755, pemerintah daerah pada saat pandemi bergantung kepada pemerintah pusat meningkat dikarenakan pemerintah daerah membutuhkan tambahan dana yang besar untuk membiaya aktivitas operasi yang digunakan untuk membiaya penanganan aktivitas pandemi covid19. Nilai rasio efektivitas setelah pandemi kembali turun menjadi 27,985, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah setelah pandemi covid19 mengalami pemulihan sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang.

Pemerintah daerah Jawa Barat memiliki nilai rata-rata rasio efektivitas sebelum pandemi sebesar 41,3605, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat melalui dana transfer sebesar 41,36% dari total pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah. Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengalami kenaikan pada saat pandemi covid19 menjadi 45,301. Peningkatan nilai rasio ketergantungan pada saat pandemi memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah selama pandemi mengalami kesulitan untuk membiaya aktivitas operasi seperti membiaya kegiatan penanganan wabah pandemi covid19 sehingga membutuhkan dana besar untuk membiayainya (Rheswari & Akbar, 2022). Kondisi pada saat setelah pandemi covid19 rasio ketergantungan mengalami penurunan menjadi 29,549, hal ini menggambarkan kondisi ekonomi mulai membaik.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan terhadap hasil pengukuran dan klasifikasi rasio kinerja keuangan

pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah DKI Jakarta

Hasil untuk Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja memiliki rasio tinggi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh nilai pada posisi Delegatif, Derajat Desentralisasi diperoleh nilai pada indikator rasio Sangat Baik, Rasio Efektivitas Pajak Daerah diperoleh nilai pada indikator rasio Cukup Efektif, dan Hasil untuk Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diperoleh nilai pada indikator rasio Sedang.

2. Pemerintah daerah Jawa Barat

Hasil dari penilaian Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja diperoleh nilai pada indikator rasio baik, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diperoleh nilai pada indikator rasio Delegatif, Derajat Desentralisasi diperoleh nilai pada indikator rasio Sangat Baik, Rasio Efektivitas Pajak Daerah diperoleh nilai pada indikator rasio Sangat Efektif, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diperoleh nilai pada indikator rasio Tinggi

Saran

Untuk pemerintah daerah DKI Jakarta perlu lebih memaksimalkan untuk merealisasikan penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan dari pajak daerah agar mampu melebihi dari target penerimaan pajak daerah. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja pemerintah daerah DKI Jakarta tinggi, diharapkan belanja operasi dikurangkan serta dialihkan untuk belanja modal yang efeknya jangka panjang seperti sarana dan prasarana. Pemerintah Jawa Barat memaksimalkan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi agar tidak bergantung besar kepada dana transfer pemerintah pusat. Selain itu bagi pemerintah Jawa Barat harus mempertahankan rasio efektivitas yang sangat tinggi dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah. Bagi peneliti lainnya dapat menambahkan rasio keuangan lainnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah serta menambahkan sampel provinsi yang akan diukur, dinilai dan diklasifikasikan berdasarkan rasio keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, W., Jatmika, W., Prodi, D., Manajemen, M., Port, S., Jayapura, N., & Kewirausahaan, D. P. (2021). Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah*, 12(1). www.papua.go.id
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Digdowiseiso, K., & Alfian, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 247–258.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi* (2nd ed.). BP Universitas Diponegoro.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 05(2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.141>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (12th ed.). PT RajaGrafindo Prasad.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *JIMEA*, 5(3), 2621–5306.
- Putri Mulyaningsih, A., Nasehati Sunaningsih, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2022). Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 2022. Issue Period, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA*, 5(3), 2621–5306.
- Rahmani, A. N. (2020). *DAMPAK COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN IMPACT OF COVID-19 ON STOCK PRICES AND FINANCIAL PERFORMANCE IN THE COMPANY (Studi pada Emiten LQ 45 yang listing di BEI)* (Vol. 21, Issue 2).
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Sartika, N. (2019). Inovbiz Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. In *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* (Vol. 7). www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Sekaran dan Bougie, U. R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras.

Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id

Zami, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal Of Reflection*, 3(2), 2615–3009. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.187>